

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

**Sampai dengan bulan Maret 2025**, Tingkat Inflasi di Kabupaten Jepara yang mengacu pada Kabupaten Kudus sebesar **M-to-M 1,29%**, **Y-to-D 1,18%**, dan **Y-on-Y 0,77%**. Dibandingkan dengan **Inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,56% (Y-on-Y)** dan **Inflasi Nasional sebesar 1,11% (Y-on-Y)**, maka inflasi di Kabupaten Jepara relatif masih lebih tinggi dibanding nasional namun lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah **tarif listrik, bawang merah, emas perhiasan, telur ayam ras, dan cabai rawit merah**.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pokok tertentu yang belum merata terutama menjelang HBKN.
2. Keterbatasan intervensi harga oleh pemerintah daerah.
3. Kebutuhan akan koordinasi lintas sektor yang intensif.
4. Kenaikan Harga LPG pada Pengecer karna adanya kendala distribusi

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3 dari 6 Upaya Konkrit Pengendalian Inflasi yang telah dilaksanakan:

1. Monitoring dan Evaluasi Harga serta Ketersediaan Barang Strategis

- Rapat teknis Tim TPID dan Rakor Mingguan dengan Kemendagri
- Monitoring dan Sidak Pasar secara rutin sekaligus input SP2KP oleh Disperindag
- Menerbitkan Surat Edaran Sekda Himbauan/Larangan Penggunaan LPG 3 Kg Bagi ASN di Kabupaten Jepara

2. Penyelenggaraan Pasar Murah (Operasi Pasar)

- PAK BUPATI (Lapak Berkah Usaha Pangan Untuk Mengendalikan Inflasi) Dilaksanakan 2 Bulan Sekali di Halaman Parkir SCJ Jepara
- Penyelenggaraan Pasar Murah HBKN
- Gerakan Pasar Murah Serentak ditiap Kecamatan se-Kabupaten Jepara sebelum HBKN
- Kolaborasi Pasar Murah Lintas Sektoral (Kejaksaan Negeri Jepara, Polres Jepara, Kodim 0719)
- Kolaborasi dengan BUMN Pertamina dengan mengadakan tukar tabung Subsidi ke Non Subsidi Gratis (isi)

### 3. Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, TPID Kabupaten Jepara menunjukkan respons aktif terhadap potensi gejolak harga, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Hal ini tercermin dari tingginya frekuensi rapat koordinasi TPID, yang menunjukkan kesiapan kelembagaan dalam merespons dinamika harga pangan dan inflasi daerah secara cepat.

Beberapa catatan evaluatif terhadap pelaksanaan kebijakan TPID:

- Adanya Indikasi Penurunan Harga setelah dilaksanakan kegiatan Operasi Pasar untuk beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti Beras, Telur, dan Cabai Rawit Merah Namun Belum tersedia dokumentasi evaluasi berbasis data konkret.
- Sinkronisasi komunikasi kepada masyarakat dan antar lembaga belum optimal. Meskipun terdapat pemanfaatan media seperti videotron dan media sosial untuk menyampaikan informasi kegiatan pasar murah, penggunaan media tersebut masih terbatas cakupannya.
- Kegiatan penanaman cabai di Kabupaten Jepara masih tergolong belum masif, mengingat keterbatasan khususnya untuk subsidi bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya. Walaupun sudah dibantu dengan anggaran CSR dsb.

### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### **Penguatan Ketahanan Pangan Daerah**

- Mendorong peningkatan produksi komoditas strategis lokal (cabai, bawang merah) melalui:
- Dukungan subsidi benih/bibit secara bertahap.
- Sosialisasi secara massif Pemanfaatan lahan pekarangan (urban farming) dan program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari).

#### **Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)**

- Kolaborasi dengan Bulog dan pelaku usaha logistik.
- Menyusun SOP pelepasan cadangan pangan saat terjadi gejolak harga.

#### **Distribusi Komoditas**

- Fasilitasi transportasi atau subsidi ongkos kirim (ongkir) antar wilayah bagi komoditas pangan lokal.

#### **Peningkatan Sinergi TPID dengan Stakeholder Terkait**